
**IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DAN DAMPAKNYA PADA
KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT MASYARAKAT MOI
DI KABUPATEN SORONG
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT)**

Kostantina Safisa^{1*}, Meinarni Asnawi², Juliana Waromi³

^{1*23} *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*

^{*}*Corresponding Author*

Abstract

The rapid development of industry in Indonesia that is not balanced with social responsibility for the environment has caused environmental damage. The long process that companies go through, from processing raw materials to turning into finished products, often focuses on maximizing profits without paying attention to environmental responsibility (Auliya, 2018). As a result, environmental damage such as air, soil, and water pollution continues to occur, one example is forest and land fires during the 2015-2019 period caused by the conversion of land to plantations (Kompas.com, 2019). To overcome this problem, the government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) initiated the Company Performance Assessment Program (PROPER) which aims to improve the company's environmental performance. One of the approaches that plays an important role in this is environmental accounting. Environmental accounting helps companies analyze waste-related costs, support decision-making, and encourage more environmentally friendly operational practices (Prasetyo, R. A & Adi, 2020). This research aims to analyze customary forest management with a green accounting approach to support sustainability. The location of the research is a palm oil company in the customary area of the Moi community, Sorong Regency. With the phenomenological method, data is collected through interviews and observations, then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that the implementation of green accounting in palm oil companies includes the integration of environmental costs in business decision-making, CSR implementation, and environmental impact management. Green accounting supports sustainability, even though its implementation is constrained by a lack of technology, standard guidelines, and understanding of human resources. The positive impacts include improving the welfare of indigenous peoples, but the negative impact is the loss of traditional livelihoods that trigger conflicts.

Keywords: *Green Accounting, and Sustainability of Customary Forests*

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri di Indonesia yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Proses panjang yang dilalui perusahaan, mulai dari mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi, sering kali berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab lingkungan (Auliya, 2018). Akibatnya, kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air terus terjadi, salah satu contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 2015-2019 yang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perkebunan (Kompas.com, 2019). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bertujuan meningkatkan kinerja lingkungan

perusahaan. Salah satu pendekatan yang berperan penting dalam hal ini adalah akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan menganalisis biaya terkait limbah, mendukung pengambilan keputusan, dan mendorong praktik operasional yang lebih ramah lingkungan (Prasetyo, R. A & Adi, 2020). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan hutan adat dengan pendekatan green accounting untuk mendukung keberlanjutan. Lokasi penelitian adalah perusahaan kelapa sawit di wilayah adat masyarakat Moi, Kabupaten Sorong. Dengan metode fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green accounting di perusahaan kelapa sawit meliputi integrasi biaya lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis, pelaksanaan CSR, dan pengelolaan dampak lingkungan. Green accounting mendukung keberlanjutan, meski implementasinya terkendala kurangnya teknologi, pedoman standar, dan pemahaman SDM. Dampak positifnya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, tetapi dampak negatifnya adalah hilangnya kehidupan tradisional yang memicu konflik.

Kata Kunci: Green Accounting, dan Keberlanjutan Hutan Adat

Pendahuluan

Maraknya perkembangan industri di Indonesia yang tidak disertai dengan tanggungjawab sosial lingkungan yang memadai mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perusahaan mengalami proses yang panjang mulai dari mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan (Auliya, 2018), selama proses yang panjang tersebut, perusahaan sering kali hanya fokus pada upaya memaksimalkan laba dan mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh terbaru dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara, tanah, dan air akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia selama periode 2015-2019. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi karena adanya peralihan fungsi lahan menjadi lahan perkebunan (Kompas.com, 2019).

Upaya dalam pelaksanaan kinerja lingkungan sejalan dengan regulasi pemerintah Indonesia mengenai Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan adalah akuntansi lingkungan. Pengaruh yang diperoleh dari penerapan akuntansi lingkungan ialah memudahkan analisis biaya lingkungan terkait dengan biaya limbah dan mendukung pengambilan keputusan dengan kegiatan operasionalnya (Prasetyo, R. A & Adi, 2020).

Konsep Green accounting merupakan saran pelaporan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan lingkungan dengan tujuan sebagai sumber informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan (Astuti, 2012) dalam (Bela, K., Said, D., & Rasyid, 2023). Konsep green accounting ini sendiri merupakan bagian dari Akuntansi lingkungan, yang mana menurut (Aninditha, 2020) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan memiliki beberapa kebijakan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya sebagai bagian dari proses pemenuhan kebutuhan untuk

kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup, sekaligus memaksimalkan pendapatan. Keberlanjutan lingkungan bertujuan untuk menjaga elastisitas dan keseimbangan ekosistem, sedangkan keberlanjutan sosial berfokus pada stabilitas sistem sosial-budaya masyarakat. Dalam perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masyarakat adat diakui sebagai kelompok sosial yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan, yang sering kali menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan. Kelompok ini termasuk minoritas adat, komunitas adat, dan berbagai pembagian etnis (Jafar, R., & Meilvidiri, 2020).

Pengungkapan biaya lingkungan sejalan dengan prinsip pengungkapan Corporate Social Responsibility. Pengungkapan CSR bagi perusahaan menjadi hal yang sangat penting, karena dapat menjadi pelindung perusahaan untuk menutupi disintegrasi sosial dan lingkungan dan juga sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan global untuk melestarikan alam dan manusia (Pelu, M. F., Tenriwaru., Saira, G, M., 2022).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh (Haryanto, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran dan implementasi green accounting di kalangan perusahaan Indonesia semakin meningkat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman dan dukungan teknis. Studi lain oleh (Nurdiana, A., & Pratiwi, 2020) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan green accounting cenderung memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik dan mendapatkan tanggapan positif dari pemangku kepentingan. Integrasi aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan mendorong perusahaan untuk mengelola sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab. Penelitian oleh (Putri, L. P., Santoso, H., & Amalia, 2021) menemukan bahwa perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan yang menerapkan green accounting menunjukkan praktek pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Implementasi green accounting memberikan pengakuan dan nilai ekonomi terhadap usaha pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian oleh (Kartika, Y., & Susilo, 2021) menunjukkan bahwa penerapan green accounting mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui kompensasi yang lebih adil atas kontribusi mereka dalam pelestarian hutan.

Dikutip dari (Antaraneews.com, 2022) Masyarakat adat Suku Moi di Provinsi Papua Barat terus mengumandangkan seruan untuk menyelamatkan hutan dari berbagai aktivitas ilegal yang merusak. Hutan merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat pribumi di wilayah Kabupaten Sorong. Pemerintah daerah telah berupaya melindungi hutan demi kehidupan masyarakat adat Suku Moi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Suku Moi di Kabupaten Sorong. Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2017 tentang hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan serta perlindungan sumber daya alam di Kampung Malaumkarta. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pemerintah daerah mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit terbesar di Kabupaten Sorong, yaitu PT Papua

Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, karena tidak mendukung masyarakat adat. Ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat adat Suku Moi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan utama dalam pengelolaan hutan adat dengan memperhatikan keberlanjutannya menggunakan pendekatan akuntansi hijau dalam implementasinya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi implementasi green accounting dan kaitannya dengan pengelolaan hutan adat dengan judul penelitian “ **Implementasi Green Accounting dan Dampaknya Pada Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Moi di Kabupaten Sorong**”.

Kajian Pustaka

Teori Legitimasi Sosial

Seperti yang diketahui teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh (Dowling dan Pfeffer, 1975) dimana mereka mengungkapkan bahwa teori legitimasi membarikan gambaran mengenai adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Lanjutnya oleh (Ghozali dan Chariri, 2007) mengungkapkan definisi dari teori legitimasi ialah sebagai suatu kondisi atau status yang ada, yang mana ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Teori legitimasi menyatakan bahwa legitimasi merupakan faktor yang penting bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan kearah yang lebih baik ke depan. Dalam meningkatkan legitimasi perusahaan, juga perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan terhadap etika bisnis, perhatian dan pengembangan kinerja karyawan, dampaknya terhadap lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian maka kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang nantinya ditunjukkan melalui pengungkapan lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan memiliki dampak baik untuk jangka panjang perusahaan (Bela, K., Said, D., & Rasyid, 2023).

Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk lingkungan, dalam operasi mereka. Dalam konteks green accounting, perusahaan perlu memperhitungkan dampak operasional mereka terhadap lingkungan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan (Freeman, R. E., 2015).

Dalam pengelolaan hutan adat, masyarakat adat adalah salah satu pemangku kepentingan utama karena mereka memiliki keterikatan budaya dan ekonomi yang mendalam terhadap hutan. Implementasi green accounting yang berbasis teori stakeholder akan memastikan bahwa pengelolaan hutan adat tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi tetapi juga kelestarian ekosistem hutan dan hak-hak masyarakat adat (Gorriz-Mifsud, E., 2016).

Dengan menggunakan green accounting yang berpihak pada kepentingan stakeholder, pengelolaan hutan adat bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat adat agar dapat mengelola hutan secara lestari dan mandiri. Informasi yang disajikan dalam green accounting dapat menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hutan adat (Sikor, T., 2017).

Green Accounting

Menurut Bell dan Lehman (1999), green accounting didefinisikan sebagai akuntansi yang melibatkan identifikasi, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Green accounting adalah jenis akuntansi lingkungan yang menyediakan gambaran mengenai integrasi manfaat lingkungan dan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Menurut (Afni, 2019), green accounting adalah proses pengakuan dan pengukuran nilai, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan yang mencakup data lingkungan dan keuangan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. (Rosaline, 2020) menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan akan mendapatkan legislasi dari masyarakat apabila perusahaan telah menerapkan green accounting sesuai dengan norma, nilai dan kepercayaan yang berlaku. Dalam tulisannya, (Saputra, 2021) menjelaskan bahwa konsep green accounting haruslah menjadi komitmen bagi para pengusaha agar perusahaan bisa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Indikator Green Accounting

Menurut (Hansen dan Mowen, 2009), menyatakan bahwa terdapat beberapa biaya yang menjadi indikator dalam penerapan green Accounting, diantaranya yaitu; biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), ialah biaya-biaya yang diperuntukan untuk aktivitas perusahaan dalam mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), ialah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam penentuan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau sebaliknya; biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*), merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Adapun biaya kegagalan eksternal lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, kategori yang direalisasikan (*realized external failure cost*) dan yang tidak direalisasikan (*unrealized external failure cost*) (Bela, K., Said, D., & Rasyid, 2023).

Pengukuran Green Accounting

Menurut (Suratno, et al, 2006) dalam (Bela, K., Said, D., & Rasyid, 2023) mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan ialah kinerja yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja lingkungan suatu perusahaan dari prestasi perusahaan yang mengikuti program PROPER (Public Disclosure Program for Environmental

Compliance) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Adapun peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya dalam hal ini pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengendalian pencemaran air laut, potensi kerusakan lahan.

Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat

Pengelolaan hutan masyarakat adat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan hutan. Prinsip ini mengakui hak-hak tanah adat dan keberadaan sistem hukum adat yang sering kali berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi ini tidak hanya membantu dalam perlindungan hutan tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan hutan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh anggota komunitas (Wilson, R., & Carter, 2017).

Pengetahuan tradisional masyarakat adat sering kali berisi praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Praktik ini termasuk sistem rotasi penebangan, pengelolaan hasil hutan non-kayu, dan teknik agroforestri yang dirancang untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pengetahuan ini, yang telah diwariskan secara turun-temurun, dapat berfungsi sebagai panduan untuk praktik pengelolaan hutan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan (Green, L., & Lee, 2018).

Pengelolaan hutan masyarakat adat juga berfokus pada penciptaan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal tanpa merusak lingkungan. Ini dapat mencakup pengembangan usaha berbasis hutan seperti ekowisata, pengumpulan hasil hutan non-kayu, dan perdagangan karbon. Model ekonomi ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan yang stabil dan meningkatkan kualitas hidup sambil melindungi sumber daya hutan (Johnson, E., & Smith, 2020).

Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam pengelolaan hutan. Kebijakan yang mendukung pengelolaan berbasis komunitas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan tersebut harus mencakup mekanisme untuk mediasi konflik dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak adat (Roberts, M., & White, 2021).

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adi, R., & Sutrisno, 2016) penelitian ini menganalisis penerapan green accounting dalam pengelolaan hutan adat di Kalimantan. Dapat disimpulkan bahwa green accounting membantu dalam memantau dampak lingkungan dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Smith, A., & Johnson, 2017) penelitian ini mengevaluasi bagaimana penerapan green accounting dapat mempengaruhi praktik pengelolaan hutan adat. Studi ini

menunjukkan bahwa green accounting dapat membantu dalam memonitor dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan hutan dan mempromosikan praktik yang lebih berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Patel, M., & Nguyen, 2018) penelitian ini membahas dampak penerapan green accounting terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana green accounting dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Selanjutnya, (Wibowo, A., & Rahmat, 2018) penelitian ini mengevaluasi dampak green accounting terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan masyarakat di Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green accounting dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan.

Prasetyo, L., & Suryani, (2019) penelitian ini membahas bagaimana green accounting diintegrasikan dalam pengelolaan hutan adat di Papua. Studi ini mengidentifikasi tantangan dan manfaat dari penerapan green accounting dalam konteks lokal. Sedangkan, hasil penelitian (Fernandez, L., & Roberts., 2019) penelitian ini mengeksplorasi bagaimana green accounting dapat memperkuat praktik pengelolaan hutan adat. Studi ini mengidentifikasi indikator kunci yang digunakan dalam green accounting untuk menilai keberlanjutan dan efektivitas praktik pengelolaan. Kusuma, B., & Anwar, (2021) penelitian ini menganalisis efektivitas green accounting dalam pengelolaan hutan adat di Sumatra. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green accounting dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya dan mendukung keberlanjutan hutan adat. Hasil penelitian (Brown, T., & Wang, 2021) penelitian ini mengevaluasi berbagai metode green accounting yang diterapkan dalam pengelolaan hutan adat di Asia Tenggara. Penelitian ini menemukan bahwa green accounting dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Hasil penelitian (Hidayat, D., & Mulyani, 2022) penelitian ini mengkaji penerapan green accounting dalam pengelolaan hutan adat di Nusa Tenggara Timur dan dampaknya terhadap keberlanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa green accounting dapat meningkatkan pengelolaan hutan dan mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Selanjutnya, hasil penelitian (Lee, J., & Turner, 2022) penelitian ini membahas tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan green accounting ke dalam sistem pengelolaan hutan adat. Fokus utama dari studi ini adalah pada bagaimana green accounting dapat membantu dalam pelaporan dan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan hutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat moi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini dilakukan dengan metode fenomenologi, data evaluasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi akan di analisis serta dievaluasi berdasarkan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive

sampling, dimana sampel yang diambil ialah informan kunci sesuai kriteria pengambilan sample yaitu Karyawan perusahaan kelapa sawit, aparatur di lingkungan DLH Kabupaten Sorong, BAPPEDA Kabupaten Sorong dan Perwakilan tokoh masyarakat adat moi. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan panduan wawancara secara langsung kepada para informan. Alat analisis data yang digunakan ialah triangulasi dengan pendekatan analisis deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, evaluasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Green Accounting pada Perusahaan Kelapa Sawit

Dari hasil wawancara dengan para responden yaitu para pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, staf BAPPEDA Kabupaten Sorong, Karyawan perusahaan kelapa sawit dan perwakilan masyarakat mereka menerangkan bahwa *“konsep akuntansi lingkungan berkaitan dengan penyajian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki lingkungan atau berkaitan dengan penggabungan informasi biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis. Dijelaskan pula bahwa akuntansi lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Sehingga secara keseluruhan, green accounting bertujuan untuk mengubah cara perusahaan untuk memperhitungkan nilai dan dampak lingkungan, mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggungjawab”*.

Dijelaskan juga oleh mereka dalam wawancara yang dilakukan bahwa terdapat regulasi yang berkaitan dengan implementasi akuntansi lingkungan di perusahaan yaitu *“UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permen LHK No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, Permen LHK No 27 tahun 2021 tentang indeks kualitas lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, serta aturan tentang standar program penilaian kinerja perusahaan (PROPER) dari KLHK”*. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa proses implementasi green accounting pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong disampaikan oleh Sekertaris, Kasie Kajian Dampak Lingkungan, Kasie Limbah B3, dan Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di lingkungan DHL Kabupaten Sorong yaitu: *Implementasi green accounting pada perusahaan sawit adalah melalui corporate social responsibility perusahaan seperti pemberian beasiswa kepada masyarakat adat, membuka peluang kerja bagi masyarakat adat yang ada di sekitar perusahaan. Selain itu perusahaan juga membuat laporan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka untuk mengurangi dampak negatif dari operasional kegiatan perusahaan dengan cara melakukan pengelolaan terhadap limbah cair yang dihasilkan pada IPAL, melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 serta melakukan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL setiap semesternya”*. Walaupun demikian, ditambahkan juga oleh Kasie RPPLH dan KLHS di lingkungan DHL Kabupaten Sorong yaitu: *proses implementasi green accounting pada perusahaan kelapa sawit di kabupaten sorong belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak perusahaan”*. Sedangkan, disampaikan oleh karyawan

perusahaan kelapa sawit bahwa: *“proses implementasi green accounting di perusahaan kelapa sawit sudah mulai dilakukan identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan diantaranya penggunaan lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dan limbah sesuai dengan PROPER dari KLHK”*.

Adapun tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan green accounting seperti yang dijelaskan oleh Sekertaris, Kasie Kajian Dampak Lingkungan, Kasie Limbah B3, dan Kasie RPPLH dan KLHS yaitu *“kesulitan untuk mengukur dan mengevaluasi dampak lingkungan, perlu komitmen dari seluruh bagian organisasi, belum adanya standar akuntansi lingkungan yang seragam, perusahaan juga masih belum menyadari pentingnya akuntansi lingkungan, tidak semua perusahaan memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan akuntansi lingkungan, dan kurangnya teknologi dalam mengukur dan menganalisa data lingkungan”*. Disampaikan juga oleh karyawan perusahaan kelapa sawit bahwa: *“tantangan yang dihadapi perusahaan yaitu terkait standarisasi dan perbandingan keseragaman standar yang konsisten dalam menyusun laporan yang dapat dibandingkan secara efektif”*.

Selanjutnya, jenis data atau informasi yang dikumpulkan melalui penerapan green accounting disampaikan oleh Sekertaris, Kasie Kajian Dampak Lingkungan, Kasie Limbah B3, dan Kasie RPPLH dan KLHS yaitu *“data lingkungan dan data finansial, selain itu data yang dikumpul juga berupa data dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan lingkungan yang wajib dilaksanakan. Selain itu, Dengan adanya penerapan akuntansi lingkungan suatu perusahaan, maka kinerja perusahaan dibidang lingkungan dapat diketahui, kebijakan perusahaan dalam menggunakan teknologi ramah lingkungan serta komitmen perusahaan dalam melestarikan atau menjaga lingkungan, data lainnya juga dapat berkaitan dengan konservasi lingkungan”*. Selanjutnya, ditambahkan juga dari hasil wawancara dengan karyawan perusahaan kelapa sawit disampaikan bahwa: *“jenis data atau informasi yang dikumpulkan terkait green accounting yaitu data penggunaan energi, penggunaan air, pengelolaan limbah dan yang berkaitan dengan biaya lingkungan yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan”*.

Penerapan Green Accounting dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Moi

Selanjutnya, disampaikan juga oleh Staf BAPPEDA Kabupaten Sorong bahwa: *“perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap hutan, dengan cara menanam ulang hutan yang sudah rusak, memelihara air, kali dan sungai yang sudah rusak akibat aktivitas perusahaan”*. Disampaikan juga oleh Tokoh Agama setempat bahwa *“penerapan akuntansi lingkungan memberi manfaat untuk keberlangsungan dan terpeliharanya ekosistem yang seimbang”*.

Selanjutnya, pada saat wawancara dengan Sekertaris DLH Kabupaten Sorong menyampaikan terkait keterlibatan masyarakat adat dalam proses green accounting yaitu: *“seperti pengelolaan hutan adat, menjaga dan melindungi kearifan lokal terkait konservasi*

lingkungan”. Selain itu, disampaikan juga oleh Kasie Kajian Dampak Lingkungan menyampaikan bahwa: *“pengakuan atas hak adat milik masyarakat adat seperti sumber daya alam dan kompensasi/ganti rugi yang sesuai dengan keterlibatan dalam mengelola lingkungan demi keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan”*. Hal lainnya ditambahkan juga oleh Kasie Limbah B3 yaitu: *“masyarakat adat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR perusahaan, sehingga masyarakat adat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka diakui dan dihargai, serta dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara perusahaan dan masyarakat adat”*. Selanjutnya, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa: *“pelibatan masyarakat adat melalui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada wilayah adat yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan, selain itu dampak dari partisipasi masyarakat mengatasi terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dari sisi ekonomi, sosial dan kesehatan”*. Dijelaskan pula oleh Kasie RPPLH dan KLHS bahwa: *“sampai sejauh ini belum ada perusahaan yang melibatkan masyarakat adat dalam proses green accounting di kabupaten sorong, masyarakat adat hanya dilibatkan pada saat sidang AMDAL”*. Selanjutnya, disampaikan oleh Kasie Pertanian dan Perikanan Ekonomi bahwa: *“hak-hak ulayat masyarakat diakui perusahaan dapat memperhatikan apa yang menjadi hak masyarakat terutama aspirasi mereka seperti biaya pendidikan, perumahan dan sarana ibadah”*.

Selanjutnya terkait dampak ekonomi dari akuntansi lingkungan bagi masyarakat moi seperti yang disampaikan oleh staff BAPPEDA kabupaten sorong, bahwa: *“dampaknya bagi masyarakat moi yaitu pendapatan masyarakat meningkat, pendidikan terpenuhi dan diberikan perumahan serta ketersediaan lapangan kerja”*. Namun, disampaikan oleh Tokoh Agama bahwa: *“ketika akuntansi lingkungan berlaku dengan baik dan benar masyarakat adat menerima manfaat. Hal lainnya, bahwa sekarang ini dengan adanya aktivitas perusahaan berdampak pada hilangnya penghidupan masyarakat moi dalam mengelola sumber daya alamnya sebagai sumber mata pencahariannya. Disampaikan juga bahwa masyarakat moi memiliki hubungan dengan alam yang kuat, pemerintah dan pihak lain dinilai sebagai sumber masalah untuk keterpisahan alam dengan masyarakat moi”*. Rekomendasi yang disampaikan oleh tokoh agama untuk meningkatkan efektivitas akuntansi lingkungan dalam pengelolaan hutan adat dimasa depan yaitu: *“terbangunnya pemahaman dasar hutan adalah subjek, Peraturan daerah kabupaten sorong terkait perlindungan hutan harus dikelola, dijaga oleh masyarakat moi dan pemerintah adalah mitra, bukan penguasa atau mengalihkan kepemilikan sumber daya alam dari masyarakat adat kepada pemerintah”*. Hal lainnya ditambahkan oleh Staff BAPPEDA Kabupaten Sorong yaitu: *“perusahaan harus memperhatikan hutan, alam, tanah, sungai yang sudah rusak, akibat aktivitas perusahaan demi anak cucu ke depan”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat di buat kesimpulan bahwa konsep green accounting atau akuntansi lingkungan berfokus pada penyajian biaya lingkungan dalam keputusan bisnis perusahaan. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan mengukur dan mengelola dampak

lingkungan dari aktivitasnya, serta mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Adi, R., & Sutrisno, 2016) bahwa green accounting membantu dalam memantau dampak lingkungan dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya hutan. Green accounting dapat membantu dalam memonitor dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan hutan dan mempromosikan praktik yang lebih berkelanjutan (Smith, A., & Johnson, 2017).

Disampaikan juga bahwa implementasi green accounting pada perusahaan kelapa sawit meliputi program CSR, seperti pemberian beasiswa, membuka peluang kerja untuk masyarakat adat, serta pelaporan lingkungan melalui RKL-RPL. Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah cair melalui IPAL dan limbah B3 sesuai standar PROPER. Namun, implementasi ini belum optimal, dengan tantangan di bidang pengelolaan dampak lingkungan dan konsistensi pelaporan, selain itu kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi dampak lingkungan secara akurat, belum adanya standar akuntansi lingkungan yang seragam, minimnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya akuntansi lingkungan, serta Kekurangan SDM dan teknologi untuk mendukung penerapan green accounting. Hasil ini seperti yang disampaikan oleh (Prasetyo, L., & Suryani, 2019) yang mengidentifikasi tantangan dan manfaat dari penerapan green accounting dalam konteks lokal.

Selain itu dari hasil wawancara juga disampaikan data yang dikumpulkan mencakup informasi finansial dan lingkungan, seperti penggunaan energi, penggunaan air, pengelolaan limbah, dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, serta kebijakan terkait teknologi ramah lingkungan dan konservasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lee, J., & Turner, 2022) yaitu bahwa bagaimana green accounting dapat membantu dalam pelaporan dan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan hutan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan green accounting memberikan peluang besar untuk melibatkan masyarakat adat Moi dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengakuan atas hak ulayat, keterlibatan dalam perencanaan CSR, dan perlindungan hutan adat. Namun, keterlibatan ini masih minim, terbatas pada proses AMDAL, tanpa partisipasi aktif dalam pengelolaan atau pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dampak positif penerapan green accounting mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat adat melalui pendidikan, pekerjaan, dan akses ke fasilitas sosial. Namun, dampak negatifnya adalah hilangnya sumber penghidupan tradisional akibat aktivitas perusahaan, yang sering kali menyebabkan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat.

Penutup

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan green accounting pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong mencakup integrasi biaya lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan upaya pengelolaan dampak lingkungan. Green accounting membantu perusahaan mengukur,

mengelola, dan melaporkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan, mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, implementasinya masih belum optimal, dihadapkan pada tantangan seperti pengukuran dan evaluasi dampak lingkungan sering kali tidak akurat karena kurangnya teknologi yang memadai, tidak adanya pedoman standar akuntansi lingkungan yang konsisten menghambat efektivitas pelaporan, kurangnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan green accounting. Dampak positif penerapan green accounting mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat adat melalui pendidikan, pekerjaan, dan akses ke fasilitas sosial. Namun, dampak negatifnya adalah hilangnya sumber penghidupan tradisional akibat aktivitas perusahaan, yang sering kali menyebabkan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lingkup pada jenis perusahaan lainnya serta melakukan wawancara lebih mendalam serta dapat memperoleh laporan aktivitas operasional terkait dengan biaya lingkungan yang dibiayai perusahaan.

Penelitian ini hanya mencakup satu kabupaten, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah.

Daftar Pustaka

- Adi, R., & Sutrisno, M. (2016). Penerapan Green Accounting untuk Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*.
- Afni, Z. (2019). Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemeriksaan Green Accounting Pada Perusahaan PT PLN Persero UPK Bukit Tinggi. *Jurnal Akuntansi Riset*, 11(2).
- Aninditha, R. & H. (2020). Akuntansi Lingkungan dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2).
- Antaranews.com. (2022). *Seruan menyelamatkan hutan sebagai sumber pangan dari Suku Moi*. <https://www.antaranews.com/berita/2888873/Seruan-Menyelamatkan-Hutan-Sebagai-Sumber-Pangan-Dari-Suku-Moi>.
- Auliya, M. R. (2018). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI dan Mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kementre. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung*.
- Bela, K., Said, D., & Rasyid, S. (2023). Green Accounting: Realitas dan Pengungkapannya (Studi Pada Industri Kehutanan di Papua Selatan). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 3198–3205.
- Brown, T., & Wang, E. (2021). Evaluating Green Accounting Methods for Sustainable Indigenous Forest Management: Case Studies from Southeast Asia. *International Journal of Green Economics*.
- Fernandez, L ., & Roberts., D. (2019). The Role of Green Accounting in Enhancing the Sustainability of Indigenous Forest Management Practices. *Sustainability Science*.
- Freeman, R. E., et al. (2015). Stakeholder Theory and the Environment: A Conceptual Framework. *Business Ethics Quarterly*, 25(4), 459–484.

- Gorriz-Mifsud, E., et al. (2016). Institutionalization of forest ecosystem services in Catalonia (north-eastern Spain): Stakeholder perspectives. *Land Use Policy*, 50, 240–253.
- Green, L., & Lee, T. (2018). Traditional Knowledge and Sustainable Forest Management: Case Studies from Indigenous Communities. *Ecology and Society*.
- Haryanto, A. T. (2018). Implementasi Green Accounting di Indonesia: Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(2), 145–160.
- Hidayat, D., & Mulyani, I. (2022). Penerapan Green Accounting pada Hutan Adat di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus dan Implikasinya. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Lingkungan*.
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. (2020). Keseimbangan Antara Ekonomi, Keberlanjutan Lingkungan, dan Masyarakat Adat. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(2), 70–82.
- Johnson, E., & Smith, M. (2020). Economic Opportunities and Challenges in Indigenous Forest Management. *Journal of Sustainable Development*.
- Kartika, Y., & Susilo, E. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat Melalui Implementasi Green Accounting. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 18(3), 245–260.
- Kompas.com. (2019). *BNPB 80 persen lahan terbakar berubah jadi lahan perkebunan*. <https://nasional-kompas.com/read/2019/09/18/09532771/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-lahan-perkebunan>
- Kusuma, B., & Anwar, F. (2021). Efektivitas Green Accounting dalam Pengelolaan Hutan Adat: Analisis dari Sumatra. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*.
- Lee, J., & Turner, K. (2022). Integrating Green Accounting into Indigenous Forest Management Systems: Challenges and Opportunities. *Journal of Forest Economics*.
- Nurdiana, A., & Pratiwi, R. (2020). Dampak Green Accounting terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(3), 215–230.
- Patel, M., & Nguyen, S. (2018). Impact of Green Accounting on the Sustainability of Community-Based Forest Management. *Journal of Environmental Management*.
- Pelu, M. F., Tenriwaru., Saira, G, M., & M. (2022). Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Management & Business*, 5(1).
- Prasetyo, L., & Suryani, Y. (2019). Integrasi Green Accounting dalam Pengelolaan Hutan Adat: Studi Empiris di Papua. *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*.
- Prasetyo, R. A & Adi, P. H. (2020). Analisis Penerapan Enviromental Accounting pada Perlakuan Atas Biaya Lingkungan di Puskesmas Cebongan Salatiga. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, 4(1), 271–287.
- Putri, L. P., Santoso, H., & Amalia, R. (2021). Pengaruh Green Accounting terhadap Praktik Pengelolaan Lingkungan di Sektor Kehutanan dan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(2), 189–204.
- Roberts, M., & White, S. (2021). Governance and Policy in Indigenous Forest Management: Lessons Learned. *Forest Policy and Economics*.
- Rosaline, V. D. dan E. W. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Saputra, K. A. K. dan M. (2021). Menggabungkan Konsep Green Accounting dengan Peraturan Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Internasional Ekonomi Energi Dan Aturan.*, 11(4).

- Sikor, T., et al. (2017). Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *World Development*, 97, 302–317.
- Smith, A., & Johnson, B. (2017). Green Accounting and Sustainable Forest Management: An Evaluation of Indigenous Forest Practices. *Environmental Economics and Policy Studies*.
- Wibowo, A., & Rahmat, H. (2018). Dampak Implementasi Green Accounting pada Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Masyarakat di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Dan Lingkungan*.
- Wilson, R., & Carter, D. (2017). Participation and Rights in Indigenous Forest Management: A Review. *Journal of Forest Policy and Management*.